

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kota Medan sebagai kota sentral ekonomi di daerah Sumatera Utara adalah kota yang mempunyai perkembangan yang tumbuh dengan pesat, oleh karena itu maka pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana kota untuk menunjang kelancaran dari pertumbuhan kota Medan itu sendiri.

Penduduk suatu kota memegang peranan yang sangat penting dalam setiap kajian studi perkotaan. Hal ini disebabkan karena perkembangan penduduk kota baik yang menyangkut kuantitas maupun kualitas merupakan faktor utama dari eksistensi kota itu sendiri. Seiring berkembangnya beragam aktivitas perkotaan, memicu pertumbuhan penduduk sebagai sarana pelaksananya. Pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah perkotaan selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan ruang. Semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula kebutuhan akan ruang kota, oleh karena itu penduduk menjadi salah satu faktor yang mempunyai kontribusi terbesar bagi terbentuknya aktivitas perkotaan. Terdapat berbagai macam aktivitas yang menjadi ciri perkotaan, antara lain permukiman, industri, komersial, dan lain-lain.

Perkembangan kota selain dipengaruhi oleh faktor penduduk, dipengaruhi pula oleh faktor sosial budaya dan faktor sosial ekonomi. Faktor sosial budaya yang dimaksud adalah mencakup perubahan pola atau tata cara kehidupan masyarakat (Hendarto, 2005: 43). Sedangkan faktor sosial ekonomi dalam hal ini berkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi kota tersebut yang berpengaruh terhadap ragam kegiatan usaha masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong proses pertumbuhan kota menjadi lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Untuk itu, maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh peningkatan pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana presentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari presentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut.

Pertumbuhan ekonomi suatu kota dapat dilihat dari tingginya aktivitas perekonomian. Kondisi ini berpengaruh terhadap pertumbuhan maupun perkembangan aktivitas lain di kawasan-kawasan perkotaan seperti munculnya kawasan permukiman baru, kawasan industri, serta kawasan perdagangan dan jasa (komersial). Aktivitas-aktivitas perkotaan tersebut perlu didukung dengan adanya transportasi. Dalam kaitannya dengan bidang ekonomi, kebutuhan akan transportasi merupakan kebutuhan turunan (*derived demand*) akibat dari adanya aktivitas ekonomi, sosial dan sebagainya. Hal ini didukung dengan konsep transportasi yang dikemukakan oleh Haryono Sukarto (2006) yaitu adanya pergerakan berupa perjalanan (*trip*) dari asal (*origin*) sampai ke tujuan (*destination*). Asal (*origin*) dapat berupa rumah, sehingga perjalanan yang dilakukan disebut *home based trip*.

Keberadaan transportasi sebagai pendukung pergerakan masyarakat akan memberikan implikasi positif terhadap semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan suatu kota. Namun, perkembangan transportasi sampai saat ini

tidak hanya memberikan implikasi positif tetapi juga implikasi negatif, seperti kemacetan, *kesemrawutan*, dan kecelakaan lalu lintas. Menurut Bayu A. Wibawa (1996), terdapat kecenderungan bahwa berkembangnya suatu kota bersamaan pula dengan berkembangnya masalah transportasi yang terjadi. Implikasi negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan transportasi salah satunya disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk yang memberikan pengaruh pada meningkatnya *demand* terhadap sarana maupun prasarana transportasi.

Di sisi lain, masalah transportasi juga sangat berkaitan erat dengan kebijakan tata ruang. Pakar ilmu transportasi Warpani (1987) berpendapat bahwa ruang merupakan kegiatan yang ditempatkan di atas lahan kota, sedangkan transportasi merupakan sistem jaringan yang secara fisik menghubungkan satu ruang kegiatan dan ruang kegiatan lainnya. Perencanaan kota tanpa mempertimbangkan keadaan dan pola transportasi akibat dari perencanaan itu sendiri akan menimbulkan keruwetan lalu lintas di kemudian hari yang berakibat dengan meningkatnya kemacetan lalu lintas dan akhirnya meningkatkan pencemaran udara (Sukarto, 2006).

Sebagai contoh Ibukota Kota Jakarta yang memiliki jumlah penduduk sebesar 8.361.000 jiwa pada tahun 2000 (BPS) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu sebesar 5,29 % pada awal tahun 2009 dihadapkan pula pada masalah transportasi berupa kemacetan lalu lintas. Jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi membawa implikasi terhadap meningkatnya jumlah perjalanan yang berakibat pada meningkatnya permintaan akan sarana dan prasarana transportasi. Perencanaan serta sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai menjadi penyebab kemacetan lalu lintas yang terjadi. Secara

ekonomis, masalah kemacetan lalu lintas akan menciptakan biaya sosial, biaya operasional yang tinggi, hilangnya waktu, polusi udara, tingginya angka kecelakaan, bising, dan juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki.

Meningkatnya mobilitas orang memerlukan sarana dan prasarana transportasi yang memadai, aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat. Peningkatan pendapatan/kapita membuat masyarakat mampu untuk membeli kendaraan seperti sepeda motor maupun mobil sebagai sarana transportasi pribadi. Peningkatan perekonomian daerah juga menyebabkan kebutuhan akan sarana transportasi lain seperti bus dan truk meningkat. Akibatnya, semakin hari jumlah arus lalu lintas dan jenis kendaraan yang menggunakan ruas-ruas jalan semakin bertambah. Hal ini menimbulkan masalah di bidang transportasi, salah satunya adalah masalah kemacetan yang ditimbulkan oleh lalu lintas, yang salah satunya adalah kawasan sekolah.

Kemacetan jalan merupakan suatu masalah yang harus dipecahkan bersama. Karena dengan kondisi kemacetan seperti ini akan terjadi pembebanan yang berlebihan pada jalan, yang pada akhirnya mengakibatkan kemacetan lalu lintas, kenyamanan perjalanan terganggu, kebosanan, kelelahan, pemborosan waktu dan materi, yang pada akhirnya terjadi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Masalah lalu-lintas merupakan masalah penting di Kota Medan karena lalu-lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, apabila lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan maka mobilitas penduduk juga akan mengalami gangguan. Dampak dari gangguan ini misalnya: pemborosan bahan bakar, waktu dan polusi udara.

Membicarakan masalah lalu lintas terutama di Kota Medan merupakan hal yang sangat penting, karena masalah ini adalah masalah bersama yang harus dipecahkan secara bersama apabila masalah lalu-lintas tidak terpecahkan maka penduduk Kota Medan sendiri yang akan menanggung kerugiannya dan apabila terpecahkan dengan baik penduduk Kota Medan juga yang akan mengambil manfaatnya.

Saat ini lalu-lintas Kota Medan yang macet merupakan masalah sehari-hari warga Kota Medan, khususnya di daerah sekitar lokasi sekolah. Hal ini terjadi karena pertumbuhan jalan dan penambahan jumlah kendaraan bermotor tidak seimbang dan perilaku masyarakat yang tidak mematuhi peraturan sehingga membuat lalu-lintas di Kota Medan macet.

Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Medan juga menghadapi permasalahan transportasi berupa kemacetan lalu lintas. Kemacetan seperti ini dapat dilihat disekitar sekolah di wilayah inti Kota Medan, diantaranya: Sekolah Methodist II di Jalan Perintis Kemerdekaan, Sekolah Perguruan Sutomo di Jalan Thamrin Medan, Sekolah Santo Thomas di Jalan S. Parman, dimana siswa kebanyakan menggunakan mobil dan sepeda motor untuk berangkat ke sekolah. Hal ini tentu saja akan menambah beban jalan untuk digunakan sebagai lahan parkir, karena areal parkir di dalam lapangan sekolah tidak bisa menampung banyaknya kendaraan siswa yang hendak parkir, yang pada akhirnya para siswa memarkirkan kendaraan mereka di pinggiran jalan disekitar sekolah tersebut.

Bagian inti wilayah di Kota Medan seperti Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Thamrin dan Jalan S. Parman, merupakan salah satu bagian wilayah Kota Medan yang tingkat pertumbuhannya pesat. Wilayah tersebut dikenal sebagai daerah bisnis dan pendidikan. Terjadinya penambahan volume lalu lintas jalan di

sekitar daerah ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan. Hal ini sering diakibatkan oleh perilaku masyarakatnya yang kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal lain yang mempengaruhi kemacetan lalu-lintas disebabkan pula oleh adanya pergerakan kendaraan keluar masuk dari suatu sekolah dan kendaraan yang menyeberang jalan baik yang bertujuan untuk masuk ke area parkir sekolah maupun yang bermaksud meninggalkan sekolah tersebut. Keadaan tersebut masih pula diperparah dengan adanya angkutan umum yang berhenti menunggu penumpang menambah pula kesemrawutan jalan sekitar sekolah.

Kondisi seperti ini memang wajar, karena area parkir yang disediakan oleh pihak sekolah dan pihak yang berkepentingan lainnya sudah tidak mampu menampung kendaraan. Seperti misalnya di Jalan Thamrin Medan ada sekolah Sutomo II dan SMA Methodist, Jalan Perintis Kemerdekaan ada Sekolah Methodist dan di Jalan S. Parman ada Sekolah Santo Thomas. Selain itu, kurangnya manajemen atau pengaturan tata cara parkir yang dilakukan oleh para tukang parkir di sekolah tersebut. Karena dengan kurangnya manajemen dari tukang parkir akan mengakibatkan kemacetan yang tak bisa dihindarkan oleh para pengguna jalan.

Dari kondisi tersebut, maka sudah seharusnya pemerintah Kota Medan mewajibkan membuat analisis dampak lalu lintas untuk setiap ruas jalan di sekitar lokasi sekolah. Karena dengan dibuat Analisis Dampak Lalu – Lintas maka diharapkan gangguan – gangguan lalu lintas dapat segera di ketahui sedini mungkin untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja jalan sekitar pusat – pusat kegiatan dan dapat memberikan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan lalu – lintas terutama sekitar sekolah yang berada di Inti Kota Medan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terjadinya kemacetan lalu lintas akibat bertambahnya jumlah pengguna kendaraan bermotor.
2. Kurangnya lahan parkir disekitar areal sekolah
3. Kondisi ruas jalan yang kurang luas mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas.
4. Kurangnya manajemen yang baik dari para tukang parkir untuk mengatur kendaraan yang hendak parkir.
5. Perilaku masyarakat pengguna jalan yang kurang mematuhi rambu- rambu lalu lintas.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah penelitian ini dibatasi pada permasalahan lalu lintas sekitar lokasi sekolah di wilayah Inti Kota Medan.

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah manajemen perparkiran di sekitar lokasi sekolah di wilayah Inti Kota Medan?
2. Bagaimanakah kondisi titik ruas jalan di sekitar lokasi sekolah di wilayah Inti Kota Medan?

3. Bagaimanakah perilaku masyarakat pengguna jalan di sekitar lokasi sekolah di wilayah Inti Kota Medan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen perparkiran di sekitar lokasi sekolah di wilayah Inti Kota Medan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi titik ruas jalan di sekitar lokasi sekolah di wilayah Inti Kota Medan.
3. Untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat pengguna jalan di sekitar sekolah di wilayah Inti Kota Medan.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai memenuhi persyaratan akademik pada Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial.
2. Sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan dan cakrawala penulis tentang permasalahan lalu lintas disekitar lokasi sekolah di wilayah inti Kota Medan.
3. Sebagai gambaran informasi yang jelas kepada penulis dan semua pihak tentang dampak kemacetan.
4. Sebagai sumbangan informasi bagi pemerintah setempat dalam kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan.
5. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lainnya khususnya mengenai objek yang sama untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih sempurna